

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN (STUDI KASUS: PEMERINTAHAN KOTA DEPOK – JAWA BARAT)

Amelia Oktrivina D. Siregar¹, Ira Mariana S²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia
ameliaoktrivina@univpancasila.ac.id

Abstract

This study aims to determine the financial performance of Depok City Government in 2015-2017 seen from: fiscal decentralization degree ratio, local financial independent ratio, PAD effectiveness ratio, regional financial efficiency ratio, and harmonious ratio. This research is quantitative descriptive. This research was conducted at the Department of Revenue, Financial Management and Assets of the City Government of Depok. Data collection uses the documentation method. The data analysis technique used is quantitative descriptive. The results of the analysis show that the Depok City Government's financial performance when viewed from fiscal decentralization degree ratio can be said to be sufficient because the average ratio is still in the interval of 30.01% - 40.00%. regional financial independence ratio can be said medium because it is at an interval of 50% - 75%. PAD effectiveness ratios can be said to be very effective because the average effectiveness has exceeded 100%. The regional financial efficiency ratio is still considered quite efficient because it is still at an interval of 80% -90%. Harmonious ratio that the majority of funds owned by the Depok City Government are still prioritized for operational expenditure needs. This causes the ratio of capital expenditure to be relatively small.

Keywords: *fiscal decentralization degree ratio; local financial independent ratio; harmonious ratio; PAD effectiveness ratio; regional financial efficiency ratio*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2015-2017 dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal dapat dikatakan cukup dikarenakan karena rata rata rasio nya masih berada di interval 30,01% - 40,00%. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikatakan sedang karena berada pada interval 50% - 75%. Rasio efektivitas PAD dapat dikatakan sangat efektif karena rata rata efektivitas nya sudah melebihi 100%. Rasio efisiensi keuangan daerah masih dinilai cukup efisien karena masih berada pada interval 80%-90%. Rasio keserasian bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kota Depok masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi. Hal ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi kecil.

Kata Kunci: rasio derajat desentralisasi fiskal; rasio kemandirian keuangan daerah; rasio efektivitas PAD; rasio efisiensi keuangan daerah; rasio keserasian

Corresponding author : ameliaoktrivina@univpancasila.ac.id

History of article: Received: Desember 2019, Revised: Februari 2020, Published: April 2020

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Dengan diberlakukannya otonomi daerah seharusnya Pemerintah Kota Depok harus berani dan mampu memaksimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Memang kebanyakan kota-kota kecil di seluruh Indonesia masih belum bisa mandiri dalam hal pengelolaan kinerjanya. Banyak pejabat-pejabat daerah yang justru berbuat tidak semestinya dengan melakukan penyimpangan yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat daerah yang bersangkutan. Untuk itulah peran masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan sangat diperlukan untuk selalu memantau dan mengawasi kinerja pemerintah daerah.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya kinerja keuangan merupakan

prioritas pembangunan Pemerintah Kota Depok yang akan dicapai sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013.

Fenomena yang terjadi adalah pelaksanaan kegiatan tahun 2013 mempunyai kendala/hambatan dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya hambatan antara lain: adanya pasar yang kurang representatif, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membayar retribusi dan kondisi perekonomian masyarakat pembayar yang belum stabil.

Analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015-2017 adalah melakukan analisis Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kesenjangan.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli antara lain Pramono (2014) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok tahun 2010, 2011 sudah efektif, efisien, mengalami pertumbuhan positif serta memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman.

Namun demikian, kemandirian Pemerintah Kota Depok masih rendah karena pendapatan daerah yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya. Mariani (2013) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah efisien walaupun mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat. Sedangkan Azhar (2010) memperoleh hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebelum dan sesudah otonomi mengalami penurunan atau mengarah ke arah yang lebih buruk. Mahmud, Kawung dan Rompas (2014) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil serta tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara Bisma dan Susanto (2010) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 tidak optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antara lain; ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien. Menurut Puspitasari (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2007-2011 sudah efektif, efisien dan pertumbuhan pendapatan meningkat. Namun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Malang masih rendah dan sebagian besar dana masih digunakan untuk belanja rutin. Afriyanto dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun

Anggaran 2011-2013 juga menemukan hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu rata-rata sudah efektif, efisien dan mengalami pertumbuhan yang positif, tetapi tingkat kemandirian masih sangat rendah dan sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk belanja rutin dari pada belanja modal.

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Kasus: Pemprov. Kota Depok Tahun Anggaran 2015-2017).

KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2001), Kinerja adalah dapat di gambarkan mengenai suatu kegiatan atau program dalam tingkat mewujudkan sasaran dan tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi atau kegiatan atau program yang terdapat dalam *strategic planning* suatu organisasi. Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010), Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah "keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat". Bentuk kinerja tersebut seperti rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui suatu kebijakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui

kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Tujuan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :

- 1) Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik serta tercapainya suatu tujuan dalam waktu yang seefisien mungkin.
- 2) Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan, yang dimaksud untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah. Menurut Mahsun (2012) terdapat indikator kinerja keuangan daerah meliputi :

- 1) Indikator Masukan (*Input*)
Indikator Masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan supaya pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dan berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai atau karyawan yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang ada, dan jumlah waktu yang digunakan.
- 2) Indikator Proses (*Process*)
Indikator Proses adalah merumuskan atau menggambarkan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan produksi, ketepatan waktu maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya

: ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan produk atau jasa.

- 3) Indikator Keluaran (*Output*)
Indikator Keluaran adalah sesuatu yang diharapkan secara langsung dapat dicapai dari adanya suatu kegiatan yang dilaksanakan dan dijalankan supaya dapat keluaran yang berupa fisik atau nonfisik. Misalnya : jumlah produk atau jasa yang diproduksi serta dihasilkan dan ketepatan dalam memproduksi suatu barang atau jasa.
- 4) Indikator Hasil (*Outcome*)
Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya hasil dari keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas kinerja para karyawan atau pegawai.
- 5) Indikator Manfaat (*Benefit*)
Indikator Manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan keuntungan dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan. Misalnya : tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat partisipasi dari masyarakat.
- 6) Indikator Dampak (*Impact*)
Indikator Dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan secara langsung maupun tidak langsung, baik positif maupun negatif. Misalnya : peningkatan kesejahteraan pada masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tujuan Laporan Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa tujuan secara umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat serta mengevaluasi keputusan mengenai sumber daya. Secara spesifik,

tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecakupan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan jumlah posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran dan penerimaannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas serta kegiatannya dan memenuhi hasil kebutuhannya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan selama periode berjalan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan suatu entitas pelaporan dalam mendanai aktivitas atau kegiatannya.

Komponen Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

disebutkan unsur yang mencakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

- a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan serta menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh Pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu : pendapatan asli daerah (merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah), dana perimbangan (merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya), dan lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat).
- b) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : belanja aparatur daerah (belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparaturnegara), belanja pelayanan publik (belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya (toll) dan lain sebagainya), dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan (belanja yang manfaatnya untuk pemerintah desa dan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota).
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, yang termasuk

dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- d) Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh kepada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayarkan kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran ini pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit keuangan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi:
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal atau periode tertentu. Unsur-unsur yang dicakup oleh neraca, adalah :
 - a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan dapat diharapkan dan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - b) Kewajiban adalah utang yang timbul dan terbentuk dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah.
 - c) Ekuitas adalah suatu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
3. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas, adalah :
 - a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara atau daerah.
 - b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara atau daerah.
4. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan juga dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan-keuangan secara wajar. Dari pembahasan diatas bisa diketahui bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengungkapkan informasi secara umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro;
 - c) Menyajikan mengenai ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berjalan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d) Menyajikan informasi tentang dasar dari penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e) Menyajikan rincian dan penjelasan mengenai masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan didalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan dan dibutuhkan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang telah diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas dasar sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007).

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan Rasio Keuangan Pemerintah Daerah (Halim, 2007) adalah :

- a. Pihak eksekutif sebagai suatu landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
- b. Pemerintah pusat atau provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia untuk memberikan pinjaman maupun membeli obligasi.

Adhiantoko (2013), mengungkapkan bahwa setiap Pemerintah Daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerahnya menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian.

- a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Mahmudi (2010), derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi juga kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD (%)	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

- b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim, 2012). Selanjutnya Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (pendapatan transfer pusat) maupun dari pinjaman.

Kemandirian daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya rasio kemandirian juga mengarah serta digambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana atau data eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan begitu sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan dan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Rasio Derajat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi \& Pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah, bisa mengacu pada Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (Tabel 2).

Tabel 2. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100 %

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327, 1996

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, lalu kemudian dibandingkan dengan target yang

telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Pemerintah daerah dikatakan telah mampu menjalankan tugasnya bila mana rasio yang hendak dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas maka menggambarkan tingkat kemampuan daerah yang semakin baik. Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektivitas keuangan daerah, melalui Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (Tabel 3).

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Kuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90 – 100
Cukup Efektif	>80 – 90
Kurang Efektif	>60 – 80
Tidak Efektif	≤60

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327,1996

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah rasio yang menggambarkan dan menunjukkan tingkat perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan serta melaksanakan kegiatan pemungutan pendapatan dikategorikan secara efisien apabila rasio yang hendak dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Dengan ini maka Semakin kecil tingkat Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah tersebut semakin baik.

Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat dan tepat mengenai berapa besar tingkat biaya yang telah dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh tingkat pendapatan yang telah diterimanya sehingga dapat diketahui bahwa apakah pelaksanaan kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut berjalan efisien atau tidak. Hal ini sangat perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah sudah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti dan makna tersendiri karena apabila ternyata suatu tingkat biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target dalam penerimaan pendapatannya tersebut lebih besar daripada tingkat realisasi pendapatan yang telah diterimanya (Halim 2001).

Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

dalam rasio keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam suatu tahun anggaran berjalan, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya porsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya masih rendah (Mahmudi 2010). Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi (%)
100% keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327, 1996

e. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi biaya dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2012). Ada 2 perhitungan di

Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan berbentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi 2010). Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sampai saat ini belum ada patokan yang ideal tentang berapa besarnya rasio Belanja Operasi maupun Belanja Modal,

karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2012). Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio Belanja Modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2013). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kekeragaman.

Variabel Penelitian

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer).
3. Rasio Efektivitas PAD, yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh realisasi belanja daerah dengan realisasi penerimaan PAD yang diterima.
5. Rasio Kekeragaman, menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi biaya dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2015-2017

Teknik Analisis

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Kota Depok dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2015 - 2017. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan pada penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Kekeragaman. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Depok yang didapat dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kota Depok. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui Kinerja Keuangan

(DPPKA) Kota Depok. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil dari perhitungan yang didapat menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada Tabel 5. Pada Tabel 5 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Depok dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan. Karena terdapat penambahan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada saat tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yaitu sebesar Rp818.204.601.265 atau sebesar 33,23% dari total pendapatan daerah. Lalu pada tahun 2016 terjadi kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya menjadi Rp 922.297.784.281 yakni sebesar 37,09% dari total pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah Kota Depok juga mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.210.748.605.562 atau sebesar 45,52% dari total pendapatan daerah.

Tabel 5. Penghitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Depok Tahun 2015-2017

Thn	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
2015	818.204.601.265	2.462.139.246.349	33,23
2016	922.297.784.281	2.486.470.138.302	37,09
2017	1.210.748.605.562	2.847.403.733.204	42,52
Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal			37,61

Total Pendapatan Daerah Kota Depok dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 selalu terjadi peningkatan. Karena terdapat penambahan Pendapatan Daerah yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan

Transfer, dan lain-lain Pendapatan yang Sah dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 total pendapatan daerah Rp 2.462.139.246.349 meningkat menjadi Rp 2.486.470.138.302 pada tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya yakni Rp 2.847.403.733.204.

Dari hasil perhitungan pada table 5 diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2015 sebesar 33,23% dapat dikategorikan cukup berdasarkan dari Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal menurut sumber Tim Litbang Depdagri, Hery Susanto (2010), lalu pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 37,09% yang dikategorikan cukup dan tahun 2017 terjadi peningkatan kembali menjadi 42,52% dapat dikategorikan baik. Jadi rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 3 tahun sebesar 37,61% yang dikategorikan cukup. Karena hasil perolehan menunjukkan bahwa peningkatan secara terus menerus dari tahun sebelumnya membuktikan bahwa Pemerintah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan dan menyelenggarakan desentralisasi dengan cukup baik.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 6

Tabel 6. Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2015-2017

Thn	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2015	818.204.601.265	1.607.473.471.144	50,90
2016	922.297.784.281	1.557.540.534.321	59,21
2017	1.210.748.605.562	1.618.576.523.642	74,80
Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah			61,64

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Depok dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi kenaikan. Karena terdapat penambahan pendapatan yang terdiri dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yaitu Rp 818.204.601.265 atau sebesar 33,23% dari total pendapatan daerah. Lalu pada tahun 2016 terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi Rp 922.297.784.281 atau sebesar 37,09% dari total pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2017 Pendapatan Asli Kota Depok mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 1.210.748.605.562 atau sebesar 42,52% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan perhitungan Tabel 6 menggambarkan bahwa pendapatan atau bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi selalu mengalami kenaikan. Karena terdapat penambahan pendapatan transfer yang terdiri dari : Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Provinsi dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 yaitu Rp 1.607.473.471.144. Lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.557.540.534.321 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.618.576.523.642.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2015 sebesar 50,90% dapat dikategorikan sedang berdasarkan dari Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah menurut sumber Kepmendagri No.690.900.327, Joko Pramono (2014), sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan menjadi 59,21% yang dikategorikan sedang dan tahun 2017 terjadi kenaikan kembali menjadi 74,80% dapat dikategorikan sedang. Jadi rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama

periode 3 tahun sebesar 61,64% yang dapat dikategorikan sedang. Karena hasil perolehan menunjukkan bahwa peningkatan secara terus menerus dari tahun sebelumnya membuktikan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang dan Pemerintah Daerah Kota Depok sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah di sertai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2. Rasio Efektivitas PAD

Hasil perhitungan rasio efektifitas PAD Pemerintah kota Depok dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Penghitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2015-2017

Thn	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)
2015	818.204.601.265	697.154.396.353	117,36
2016	922.297.784.281	847.022.899.152	108,88
2017	1.210.748.605.562	1.078.263.821.181	112,28
Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD			112,84

Berdasarkan perhitungan yang terdapat di Tabel 7 menggambarkan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selalu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Karena terdapat penambahan anggaran pendapatan yang terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah yang di anggarkan yaitu Rp 697.154.396.353 lalu pada tahun 2016 dinaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 847.022.899.152. Kemudian pada tahun 2017 Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan terjadi kenaikan kembali sebesar Rp 1.078.263.821.181.

Realisasi Pendapatan Asli daerah Kota Depok dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Karena terdapat penambahan anggaran realisasi

pendapatan yang terdiri dari : Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan dan lainnya dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yaitu Rp 818.204.601.265 atau sebesar 33,23% dari total realisasi terjadi peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi Rp 922.297.784.281 atau sebesar 37,09% dari total realisasi pendapatan daerah. Kemudian pada tahun 2017 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 1.210.748.605.562 atau sebesar 42,52% dari total realisasi pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dengan Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2015 sebesar 117,36% dapat dikatakan sangat efektif, berdasarkan dari Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah menurut sumber Kepmendagri No.690.900.327, Joko Pramono (2014), sedangkan pada tahun 2016 terjadi sedikit penurunan menjadi 108,88% yang dikatakan masih sangat efektif dan tahun 2017 terjadi kenaikan kembali menjadi 112,28% dapat dikatakan sangat efektif. Jadi rata-rata Rasio Efektivitas PAD Kota Depok selama periode 3 tahun sebesar 112,84% yang dapat dikatakan sangat efektif. Dengan hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik dan mampu dalam menjalankan tugasnya.

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)
2015	2.178.595.019.630	2.462.139.246.349	88,48

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)
2016	2.755.256.803.566	2.486.470.138.302	110,80
2017	2.672.164.042.797	2.847.403.733.204	93,84
Rata-Rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah			97,70

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 8 diketahui bahwa Realisasi Belanja Daerah untuk memungut PAD Kota Depok dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 Realisasi Belanja Daerah untuk Penerimaan PAD Kota Depok sebesar Rp 2.178.595.019.630. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan, karena dimana terdapat belanja pegawai, barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan seluruh belanja modal mulai dari belanja tanah, peralatan, gedung, jalan dan asset tetap lainnya meningkat dari tahun sebelumnya menjadi Rp 2.755.256.803.566. Kemudian, pada tahun 2017 mengalami penurunan, karena dimana terdapat dari bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan, irigasi, dan jaringan dari tahun sebelumnya kembali menjadi Rp 2.672.164.042.797.

Realisasi PAD Kota Depok dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi PAD Kota Depok sebesar Rp. 818.204.601.265 atau sebesar 33,23% dari total realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan realisasi PAD menjadi Rp 922.297.784.281 atau sebesar 37,09% dari total realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan realisasi PAD menjadi Rp 1.210.748.605.562 atau sebesar 42,52% dari total realisasi pendapatan daerah.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa kinerja

keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari rasio efisiensi pada tahun 2015 sebesar 88,48% yang dapat digolongkan cukup efisien. karena interval efisiensinya diantara 80% - 90%, Rasio efisiensi pada tahun 2016 sebesar 110,80% yang dapat digolongkan tidak efisien. Karena rasionya melebihi dari 100%. Dan pada tahun 2017, rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kota Depok sebesar 93,84% yang dapat digolongkan kurang efisien. karena interval efisiensinya diantara 90% - 100%, Rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Kota Depok selama periode 3 tahun sebesar 97,70% dapat digolongkan kurang efisien. karena interval efisiensinya diantara 90% - 100%.

5. Rasio Keserasian

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada Tabel 9. Dari hasil perhitungan pada Tabel 9 diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kota Depok dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi kenaikan. Karena terdapat penambahan Belanja Daerah yang terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi belanja daerah Kota Depok yaitu Rp 2.178.595.019.630, lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.755.256.803.566. Kemudian, pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan karena berkurangnya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menjadi Rp 2.672.164.042.797.

Tabel 9. Penghitungan Rasio Keserasian Kota Depok Tahun 2015-2017 (Belanja Operasi)

Thn	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi (%)
2015	1.562.474.468.032	2.178.595.019.630	71,72
2016	1.733.973.547.568	2.755.256.803.566	62,93
2017	1.814.656.239.146	2.672.164.042.797	67,91
Rata-Rata Rasio Belanja Operasi			67,52

Total realisasi belanja operasi daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 yaitu Rp 1.562.474.468.032, lalu pada tahun 2016 menjadi Rp 1.733.973.547.568 dan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.814.656.239.146.

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tabel 9 diatas diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari belanja operasi pada tahun 2015 yaitu 71,72%, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan karena berkurangnya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menjadi 62,93%. Kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 67,91%. Jadi rata-rata rasio belanja operasi Pemerintah Kota Depok selama 3 tahun periode sebesar 67,52%.

Tabel 10. Penghitungan Rasio Keserasian Kota Depok Tahun 2015-2017 (Belanja Modal)

Thn	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Modal (%)
2015	615.731.792.480	2.178.595.019.630	28,26
2016	1.018.655.640.158	2.755.256.803.566	36,97
2017	857.242.346.380	2.672.164.042.797	32,08
Rata-Rata Rasio Belanja Modal			32,44

Berdasarkan dari hasil perhitungan pada Tabel 10 diketahui bahwa realisasi total belanja daerah Kota Depok dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terjadi kenaikan. Karena terdapat penambahan Belanja Daerah yang terdiri dari : Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi belanja daerah Kota Depok yaitu Rp 2.178.595.019.630, lalu pada tahun 2016

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya realisasi belanja daerah menjadi sebesar Rp 2.755.256.803.566. Kemudian, pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan karena berkurangnya Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Tak Terduga menjadi Rp 2.672.164.042.797.

Total realisasi belanja Modal daerah yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya mengalami kenaikan dan penurunan ditahun tertentu. Pada tahun 2015 total realisasi belanja modal yaitu Rp 615.731.792.480, lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp 1.018.655.640.158 dan pada tahun 2017 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 857.242.346.380.

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada Tabel 10 diatas diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari belanja modal pada tahun 2015 yaitu 28,26%, lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan karena bertambahnya Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Tak Terduga menjadi 36,97%. Kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena berkurangnya Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Tak Terduga menjadi 32,08%. Jadi rata-rata rasio belanja modal Pemerintah Kota Depok selama 3 tahun periode sebesar 32,44%.

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2015 yaitu 33,23% yang dikategorikan cukup berdasarkan Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal. Lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 37,09% yang dikategorikan cukup berdasarkan Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal. Dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi

42,52% yang dikategorikan baik berdasarkan Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal.

Menurut uraian dan perhitungan pada Tabel 5 dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama tiga tahun pada Pemerintah Kota Depok sebesar 37,61% dikatakan masih cukup karena masih berada dalam skala interval 30,01%-40,00% dan ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah Selain itu, kurangnya kesungguhan Pemerintah Pusat dalam memberikan sumber distribusi penerimaan pendapatan pada tiap-tiap daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami peningkatan serta perkembangan atas kenaikan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2015 Rasio Kemandirian yaitu 50,90% yang dapat dikatakan sedang berdasarkan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 59,21% yang dikatakan sedang berdasarkan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 74,80% yang dikatakan sedang berdasarkan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah.

Dapat dilihat dalam tabel diatas, Jadi rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Depok selama 3 tahun periode sebesar 61,64%. Dengan jumlah tersebut, tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kota Depok dapat dikatakan sedang karena masih berada dalam skala interval 50%-75% dan ini berarti bahwa dimana peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena pemerintah daerah dianggap sudah mulai mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga tingkat partisipasi masyarakat yang semakin

tinggi dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

3. Rasio Efektivitas PAD

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2015 yaitu 117,36% yang dapat dikatakan sangat efektif berdasarkan Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah. Lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 108,88% yang dapat dikatakan sangat efektif berdasarkan Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah. Dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi 112,28% yang dapat dikatakan sangat efektif berdasarkan Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah.

Dengan ini rata-rata Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kota Depok selama periode 3 tahun sebesar 112,84% yang dikatakan sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya sudah melebihi 100% dan ini berarti bahwa dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan. Untuk mempertahankan hal ini, Pemerintah terus mengoptimalkan atau menggarap potensi pendapatan yang telah ada atau dimiliki oleh daerahnya. Pengawasan yang baik dan peningkatan kualitas aparat sangat diperlukan demi mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini memerlukan kreatifitas serta inovasi dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber - sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2015 yaitu 88,48% yang dapat digolongkan cukup efisien berdasarkan Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan. Lalu Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2016 menjadi 110,80% yang dapat digolongkan tidak efisien berdasarkan Kriteria Efisiensi Kinerja

Keuangan. Dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2017 menjadi 93,84% yang dapat digolongkan kurang efisien berdasarkan Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.

Dengan ini rata-rata Rasio Efisiensi Pemerintah Kota Depok selama periode 3 tahun sebesar 97,70% dapat dikatakan kurang efisien karena masih berada dalam skala interval 90%-100% dan ini berarti bahwa Pemerintah Kota Depok dalam melakukan pemungutan pendapatan masih kurang baik dan belum semaksimal mungkin. Akan tetapi, Pemerintah Kota Depok bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan lebih mengoptimalkan realisasi pendapatan yang diterima agar dapat meningkatkan efisiensi keuangan daerah.

Rasio Keserasian

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari belanja operasi pada tahun 2015 yaitu 71,72%, lalu pada tahun 2016 mengalami penurunan karena berkurangnya Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan menjadi 62,93%. Kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 67,91%. Jadi rata-rata rasio belanja operasi Pemerintah Kota Depok selama 3 tahun periode sebesar 67,52%.

Berdasarkan hasil dari analisis diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari belanja modal pada tahun 2015 yaitu 28,26%, lalu pada tahun 2016 mengalami kenaikan karena bertambahnya Belanja Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Tak Terduga menjadi 36,97%. Kemudian pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 32,08%. Jadi rata-rata rasio belanja modal Pemerintah Kota Depok selama 3 tahun periode sebesar 32,44%.

Berdasarkan uraian dan perhitungan diatas bahwa sebagian dana yang dimiliki Pemerintah Kota Depok masih diprioritaskan

untuk kebutuhan belanja operasi sehingga belanja modal relatif lebih kecil. Dengan dibuktikannya dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dikarenakan Pemerintah Kota Depok lebih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat rutin seperti : dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS dari pada memperhatikan pembangunan daerah. Karena Pemerintah Kota Depok masih belum ada arahan serta acuan yang diharuskan untuk belanja modal maka dari itu masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi. Untuk kedepannya supaya lebih baik Pemerintah Kota Depok lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat. Karena pada dasarnya anggaran daerah yaitu dana masyarakat yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikatakan Cukup. Dimana tingkat Pendapatan Asli Daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah karena masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dan kesungguhan pemerintah dalam memberikan pendapatan disetiap daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dikatakan sedang. Dimana peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang. Karena pemerintah daerah dianggap mulai mampu dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah dan juga tingkat partisipasi masyarakat yang semakin tinggi. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan sangat efektif. Karena memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang

efisien. Karena Pemerintah Kota Depok dalam melakukan pemungutan pendapatan masih kurang baik dan belum semaksimal mungkin.. Untuk tahun berikutnya dilakukan upaya agar dapat meningkatkan efisiensi keuangan daerah. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Depok jika dilihat dari Rasio Keserasian dapat menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang. Karena Pemerintah Kota Depok lebih memprioritaskan pengeluaran yang bersifat rutin dari pada pembangunan daerah

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah Pemerintah Kota Depok diharapkan lebih seimbang dan profesional di dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan bisa memperpanjang masa waktu penelitian dan menggunakan rasio serta variabel yang lebih banyak. Kemudian mengambil ruang lingkup yang lebih luas lagi agar bisa lebih menunjukkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiantoko, Hony. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Afriyanto & Astuti, W. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Mahasiswa Prodi SI Akuntansi*, 1 (1).
- Aulia, Zikri. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur Periode 2011-2015*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Azhar, M. K. S. (2010). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. *Jurnal Keuangan & Bisnis*, 2 (15), Program Studi Magister

- Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan
- Bisma, I., D., G., & H. Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007. *Jurnal GeneÇ Swara Edisi Khusus*, 4 (3), 75-86.
- Detisa, Dora, (2009). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Era Otonomi Khusus Pada Pemerintahan Naggroe Aceh Darussalam*. (Skripsi). Universitas Sumatera Utara
- Dewa, I Gde Bisma & Hery, Susanto, (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007. *GaneÇ Swara*, Edisi Khusus, 4 (3).
- Fidelius, (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1 (4).
- (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 : Standar Akuntansi Pemerintah. Dilengkapi dengan : Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 s.d 10
- (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul, (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul, et.al. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, Z., Anggra. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kesenjangan*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Machmud, M., G. Kawung, & W. Rompas. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 14 (2), 1-13.
- Mahsun, Mohammad. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mariani, L. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1 (2).
- Pramono, Joko. (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7 (13).
- (2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7 (13), 83-112.
- Puspitasari, A. F. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1 (2), 1-22.
- Rahmayati, Anim. (2013). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA*, 1 (1), ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689.
- .Yani, Olga Fransiska Singkali & Retnaningtyas, Widuri. (2014). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Tax & Accounting Review*, 4 (2)
- Yosephen, Mentari Sijabat, Chirul, Saleh, & Abdul, Wachid. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan

Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (2), 236-242

Yurdhila, Martha Janur. (2009). *Analisis terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo Sesudah Otonomi Daerah*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.